

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**STRATEGI DINAS KEPEMUDAAN OLAAHRAGA DAN PARIWISATA
DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA DAERAH KOTA DUMAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Vina Restiya
187310428

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Vina Restiya
NPM : 187310428
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Strategi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Dalam Mengembangkan Pariwisata Daerah Kota Dumai
Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub sub dalam
skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan
normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta
dapat disetujui untuk di uji dalam siding ujian komprehensif.

Pekanbaru, 13 Juni 2022

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian. S. IP., M.Si

Rizky Setiawan.,S.S.IP.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Vina Restiya
NPM : 187310428
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Strategi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Dalam Mengembangkan Pariwisata Daerah Kota Dumai

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana

Pekanbaru, 13 Juni 2022

Ketua,

Sekretaris,

Rizky Setiawan.,S.S.IP.,M.Si

Syaprianto, S.Sos, M.IP

Anggota

Dr. Ranggi Ade Febrian. S. IP., M.Si

**Mengetahui
Wakil Dekan I.**

Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Vina Restiya
NPM : 187310428
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Strategi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Dalam Mengembangkan Pariwisata Daerah Kota Dumai

Naskah skripsi ini telah benar dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 13 Juni 2022

Ketua, An. Tim Penguji
Sekretaris,

Rizky Setiawan.,S.S.IP.,M.Si

Syaprianto, S.Sos, M.IP

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian. S. IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah rabbil'alamini dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“STRATEGI DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA DAERAH KOTA DUMAI”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Shalawat beserta salam tidak lupa pula dihadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi tegaknya khalimatul hak di jagat raya ini, beliau juga sebagai suri tauladan yang membawa manusia dari zaman jahiliyah (kebodohan) menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada skripsi ini mungkin ditemukan kesalahan dan kekurangan. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

4. Bapak Rizky setiawan, S.IP, M.Si yang telah berkenan untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh staff Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Terimakasih kepada Papa (Purn. Nazuardi), Mama (Marliani) dan Kak Lira Azari, Bang Afdhal, Tirmananda Azari, Bang Well Dirva, Bang Pandi Tri Kando, Kak Indah Permata Sari Tercinta, atas kerja keras dan do'a restu yang tidak ternilai harganya, dan yang telah banyak memberikan semangat, motivasi terbaik dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.
7. Terimakasih kepada Meme, Ega, Kiki, Muhammad Satya Renata S.IP, teman-teman Kelas IP F 2018. Telah membantu serta menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Terimakasih kepada orang spesial dihidup saya Andika Saputra S.AP yang telah menemani saya dalam suka duka dan tawa dimasa sekarang dan masa yang akan datang, amin. Semoga kita berdua sukses selalu serta bisa menjalankan komitmen sampai kehidupan nyata untuk kita berdua nanti.
9. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank for me having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap pembacanya.

Pekanbaru, 24 Maret 2022

Vina Restiya
187310428

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
SURAT PERNYATAAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	21
 BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	22
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	22
2. Konsep Pemerintahan Daerah.....	25
3. Konsep Manajemen Pemerintahan	27
4. Konsep Organisasi Pemerintahan	27
5. Konsep Strategi.....	29
6. Konsep Dinas Pariwisata	31
7. Konsep Kepariwisataaan	32
8. Konsep Objek Wisata	34
9. Konsep Strategi Pengembangan Objek Wisata	35
B. Penelitian Terdahulu	40
C. Kerangka Fikiran	42
D. Konsep Operasional	43
E. Operasional Variabel	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Informan	47
D. Teknik Penarikan Informan	48
E. Jenis dan Sumber Data.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data	49
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	50

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Dumai	52
1. Sejarah Singkat Kota Dumai	52
2. Topografi.....	55
3. Pemerintahan.....	55
4. Penduduk.....	55
5. Sosial	56
B. Gambaran Umum Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.....	57
1. Sejarah Singkat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.....	57
2. Tugas dan Fungsi Bidang Pariwisata	58
C. Struktur Organisasi	62

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan	64
1. Jenis Kelamin Informan	65
2. Tingkat Pendidikan Informan	66
3. Usia Informan.....	66
B. Strategi Pariwisata dalam Mengembangkan Pariwisata Daerah Kota Dumai.....	67
1. Pangsa Pasar.....	68
2. Tourist Attraction	70

3. Infrastruktur.....	72
4. Aksesibilitas	74
5. Fasilitas dan Pelayanan Wisatawan	75
C. Faktor Penghambat Strategi dalam Pengembangan Objek Wisata Daerah Kota Dumai	77
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR KEPUSTAKAAN	81
Lampiran.....	84



DAFTAR TABEL

Tabel :

I.1	Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata.....	15
I.2	Daftar Objek Wisata Kota Dumai	17
I.3	Kegiatan Promosi Pariwisata Daerah Kota Dumai.....	18
II.1	Penelitian Terdahulu dengan Sekarang	41
II.2	Operasional Variable	45
III.1	Informan.....	47
III.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	51
V.1	Data Kunjungan Wisatawan Kota Dumai.....	64
V.2	Jenis Kelamin Informan.....	65
V.3	Pendidikan Informan.....	66
V.4	Usia Informan.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar :

1.1 : Pembagian Urusan Pemerintahan	4
II.1 : Kerangka Fikir	42
IV.1 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Lembaran Pertanyaan Wawancara.....	84
2. Dokumentasi Penelitian.....	90
3. Surat Keterangan dan Rekomendasi Penelitian.....	99



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferehensif Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Vina Restiya
Npm : 187310428
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Strategi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dalam Mengembangkan Pariwisata Daerah Kota Dumai

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Maret 2022
Pelaku Pernyataan

Vina Restiya
187310428

ABSTRAK

STRATEGI DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA DAERAH KOTA DUMAI

Vina Restiya

187310428

Kota Dumai terletak di tepi pantai tentunya memiliki potensi dalam pengembangan pariwisata. Salah satunya objek wisata pantai teluk makmur atau pantai puak yang dimana sudah dikenal oleh masyarakat banyak dan memiliki potensi yang sangat besar dalam potensi pengembangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi dinas pariwisata Kota Dumai dalam pengembangan objek pantai teluk makmur dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pengembangan objek wisata Pantai Teluk Makmur Kota Dumai. Adapun metode di dalam penelitian ini menggunakan teori Edward Inskeep (1991:38), dengan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang dimana memprioritaskan daftar wawancara sebagai alat pengumpulan data serta melakukan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan strategi dinas pariwisata dalam pengembangan objek wisata pantai teluk makmur dapat dikatakan belum berjalan optimal. Hal ini dapat ditentukan oleh kelima indikator yaitu Pangsa Pasar, Tourist Attraction, Infrastruktur, Aksesibilitas, Fasilitas dan Pelayanan Wisata yaitu adanya hambatan dalam penganggaran dalam pengembangan objek wisata daerah, kurangnya kesadaran masyarakat akan sadar wisata, dan kurangnya pengawasan dari Dinas Pariwisata terhadap pengembangan objek wisata pantai teluk makmur.

Kata Kunci : Strategi, Dinas Pariwisata, Pengembangan, Pariwisata

ABSTRACT

STRATEGY OF DUMAI TOURISM DEPARTMENT IN DEVELOPMENT OF REGIONAL TOURISM IN DUMAI CITY

Vina Restiya

187310428

Dumai city is located on the beach, of course, has potential in tourism development. One of them is the tourist attraction of the prosperous bay beach or puak beach which is already known by many people and has enormous potential in development potential. This study aims to determine and describe the strategy of the Dumai City tourism office in developing the prosperous bay beach object and to determine the inhibiting factors for the development of the Teluk makmur Beach tourism object in Dumai City. The method in this study uses the theory of Edward Inskeep (1991:38), with a descriptive type with a qualitative approach, which prioritizes a list of interviews as a data collection tool as well as conducting observations and documentation. The result show that the tourism departments's strategy in developing the prosperous bay beach tourism object can be said to have not been running optimally. This can be determined by the five indicators, namely Market Share, Tourist Attraction, Infrastructure, Accessibility, Facilities and Tourism Services namely the existence of obstacles in budgeting in the development of regional tourism objects, lack of public awareness of tourism awareness, and lack of supervision from the Tourism Office on tourism object development, prosperous bay coast.

Keywords : Strategy, Department of Tourism, Development, Tourism

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan suatu organisasi pemerintahan dari beberapa bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan juga militer. Yang mana negara mempunyai unsur wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan. Tentunya unsur negara ini memiliki ketergantungan, sebab jika tidak ada rakyat tentunya tidak ada pemerintahan dan begitu sebaliknya. Di dalam suatu negara memiliki berbagai macam kekuasaan yang ada di ruang lingkup pemerintahan, baik di pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Sistem pemerintahan yang ada di dalam suatu negara memiliki tujuan agar dapat mengatur masyarakat, agar tercapainya kehidupan bangsa yang baik dan kesejahteraan bangsa.

Fungsi dari negara untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara yaitu melaksanakan ketertiban, mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran, membentuk pertahanan, serta menjaga keadilan. Dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea 4 yang dikatakan : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembukaan UUD 1945 sudah jelas bahwa pemerintah pada umumnya menggerakkan pelayanan umum, pengaturan dan perlindungan pada masyarakat serta pembangunan dan pengembangan. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara

tersebut, pemerintah sudah menyusun pemerintahan secara tertingkat yaitu, Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Desa.

Urusan pemerintahan memiliki fungsi pemerintahan yang akan menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan pemerintahan bertujuan untuk mengatur serta mengurus fungsi tersebut dan memiliki kewenangan dalam melindungi, memberdayakan, dan juga mensejahterakan rakyat. Di dalam pasal 18 Undang Undang Dasar tahun 1945, pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan.

Di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan pelaksanaan otonomi daerah mengandung prinsip otonom yang seluas luasnya yang berarti daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan pusat.

Pada Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan juga konkuren. Di dalam urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi dua yaitu Urusan Pemerintahan wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan pemerintahan wajib dan pilihan tentunya telah menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pasal 12, ayat 1.

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut dapat di ringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*) pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, pada dasarnya 4 (empat) yaitu:

- a. Sentralisasi yaitu sistem pemerintahan dimana segala kekuasaan di pusatkan di pemerintahan pusat.
- b. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.
- c. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/kepada instansi vertikal di wilayah tertentu
- d. Tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintahan kepada daerah dan/desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota/desa, dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dari penjelasan diatas pelaksanaan menggunakan asas desentralisasi, karena memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah.

Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom.

Berdasarkan pasal 9 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa pemerintahan pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan tersebut yaitu:

Gambar 1.1 : Pembagian Urusan Pemerintahan



Sumber : Undang-Undang No.23 tahun 2014 (Olahan Penulis)

Urusan Pemerintahan Pilihan menjadi salah satu kewenangan pemerintahan daerah untuk kab/kota yang salah satunya adalah bidang pariwisata. Pariwisata juga mempunyai peran yang sangat potensial dan strategis dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan dan sebagai penyeimbang ekonomi daerah. Maka dari itu daerah dituntut untuk mampu berkreasi dan memiliki strategi dalam menggali potensi dan sumber pendapatan daerah. Sub urusan pemerintahan bidang pariwisata di daerah kabupaten/kota :

1. Destinasi Pariwisata

- a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota
- b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota
- c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota
- d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota

2. Pemasaran Pariwisata

Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota

3. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Penyediaan prasarana (zona kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota

4. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 pasal 4, kepariwisataan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Menghapus kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya
- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa
- h. Memupuk rasa cinta tanah air
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa dan,
- j. Mempererat persahabatan antarbangsa

Pariwisata adalah kegiatan wisatawan yang diberi fasilitas serta layanan yang sudah disediakan oleh masyarakat, pemerintah daerah dengan bertujuan rekreasi. Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kota Dumai terletak di tepi pantai tentunya memiliki potensi dalam pengembangan pariwisata. Kota Dumai termasuk kota yang akses pintu masuk akses Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Kota Dumai, yang menjadi pintu masuk bagi pedagang dunia melalui Selat Malaka.

Untuk meningkatkan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tugas

pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif , perlu disusun rencana strategis pada kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ada di dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020.

Renstra Kemenparekraf/ Baparekraf Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berdasarkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kemenparekraf/ Baparekraf khususnya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka ditentukan tujuan strategis (*strategic goals*) Kemenparekraf/Baparekraf. Tujuan Kemenparekraf/ Baparekraf tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”. Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu: (1) Nilai devisa pariwisata; (2) Kontribusi PDB Pariwisata; (3) Nilai ekspor produk ekonomi kreatif.

Arah kebijakan dan strategi Kemenparekraf/Baparekraf menggambarkan *spirit* dan upaya yang dilakukan untuk mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan. Tujuan akhir Kemenparekraf/Baparekraf adalah meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional. Tujuan akhir tersebut dapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas (*quality tourism experience*), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun

pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu Pilar Destinasi Pariwisata dan Produk Ekonomi Kreatif, Pilar Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pilar Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pilar SDM dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Pilar Kreativitas.

Batasan kewenangan tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lampiran tabel tentang pembagian urusan pemerintah bidang pariwisata telah membagi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenparekraf/Baparekraf, adalah sebagai berikut:

1. Sub Urusan Destinasi Wisata
 - Penetapan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata
 - Pengelolaan daya tarik wisata nasional
 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN)
 - Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah provinsi
2. Sub urusan Pemasaran Pariwisata, meliputi pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata nasional.
3. Sub urusan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, melalui pengembangan ekonomi kreatif nasional yang ditetapkan dengan kriteria.

4. Sub urusan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, melalui pengembangan, penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat ahli.

Tujuan akhir tersebut dapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas (quality tourism experience), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu Pilar destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif, Pilar pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar industri pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif serta Pilar kreativitas.

Pilar pertama terkait destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif, dimana pilar ini menekankan pada pengembangan produk ekonomi kreatif berbasis Kawasan Ekonomi Kreatif dan Klaster Penguatan Ekonomi Kreatif. Pengembangan jumlah maupun jenis produk ekonomi kreatif akan mampu menggerakkan roda perekonomian nasional. Selain itu, pada pilar ini juga akan dilakukan pengembangan destinasi pariwisata berkualitas berdasarkan prioritas. Destinasi pariwisata berkualitas yang dimaksud adalah destinasi pariwisata yang mampu memenuhi unsur 3A, yaitu Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Pilar ini menegaskan pentingnya diversifikasi produk pariwisata untuk meningkatkan length of stay, dimana tidak hanya produk pariwisata baru yang dihasilkan, melainkan juga pasar baru yang belum disentuh selama ini melalui produk baru tersebut. Selain itu, pilar ini juga menekankan

pentingnya untuk penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan sebagai pedoman pengembangan Destinasi Pariwisata.

Pilar kedua adalah pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemasaran merupakan salah satu komponen penting dimana upaya pemasaran dilakukan guna menciptakan kebutuhan pelanggan akan produk pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam konteks pariwisata, pemasaran dilakukan terhadap ceruk pasar (niche market) untuk wisatawan mancanegara premium, yaitu menargetkan segmen wisatawan dengan belanja atau pengeluaran yang besar. Hal ini dilakukan melalui pemasaran produk pariwisata MICE, yaitu Meeting, Incentives, Conferencing dan Exhibition maupun melalui wisata minat khusus seperti diving, trekking, river cruising, dll. Pembangunan citra pariwisata nasional sebagai salah satu destinasi wisata dunia juga penting mengingat citra menjadi faktor utama dalam menentukan wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Sedangkan dalam konteks ekonomi kreatif, paradigma pemasaran yang dilakukan adalah perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif.

Pengembangan pasar dari narrow market menjadi broader market akan dilakukan secara masif, baik melalui regulasi yang berpihak kepada masyarakat maupun melalui pemberdayaan masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi kreatif.

Pilar ketiga adalah industri pariwisata dan ekonomi kreatif, dimana pertumbuhan dan pengelolaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif juga merupakan salah satu kunci penting dalam mewujudkan tujuan akhir Kemenparekraf/Baparekraf. Pilar ini menitikberatkan pada pengembangan industri

pariwisata dan ekonomi kreatif yang mencakup 13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif. Tata kelola industri pariwisata dan ekonomi kreatif juga penting untuk dilakukan, khususnya dalam menciptakan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif dan sinergis. Selain itu, investasi pendanaan, dan akses pembiayaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan hal lain yang perlu diperhatikan dalam memperkuat ekosistem maupun pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pilar keempat adalah SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. SDM merupakan strategic weapon yang menentukan keberhasilan organisasi. Pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan melalui optimasi pendidikan dan pelatihan vokasi untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu, sertifikasi profesional juga menjadi upaya lain dalam menjamin kualifikasi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif secara kompetensi. Selain SDM, pengembangan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif juga penting dilakukan untuk meningkatkan partisipasi komunitas dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pilar terakhir adalah kreativitas, dimana terdapat 2 isu terkait pilar ini. Isu pertama adalah terkait perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual di Indonesia. Pemerintah perlu turun tangan untuk memastikan jaminan perlindungan hukum atas hasil kreativitas dan kekayaan intelektual masyarakatnya sehingga menjadi pemicu untuk menumbuhkembangkan kreativitas. Selain itu, perlu dilakukan juga upaya dalam mendorong munculnya kreasi masyarakat dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK.

Kelima pilar ini perlu dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan dalam mewujudkan tujuan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional. Namun kelima pilar ini perlu ditopang oleh pondasi yang kuat, agar bisa berdiri dan terlaksana sesuai rencana. Pondasi tersebut adalah aspek manajerial dalam organisasi yang menjadi aset strategis Kemenparekraf/Baparekraf, yaitu:

- a. Riset dan inovasi pariwisata dan ekonomi kreatif
- b. Regulasi yang mendukung pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional
- c. Adopsi teknologi informasi dan komunikasi secara tepat guna
- d. Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu untuk tahun 2016 – 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 Visi Pembangunan Kepariwisata Nasional adalah Terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata kelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan.

Adapun untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan 4 misi yaitu pengembangan :

- 1) Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah masyarakat
- 2) Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara
- 3) Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya dan
- 4) Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata telah merumuskan Tujuan sebagai Berikut:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan ketrampilan pemuda
2. Meningkatnya aktivitas dan kualitas kegiatan lembaga keolahragaan
3. Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata dan promosi wisata
4. Terwujudnya peningkatan kunjungan objek wisata
5. Mewujudkan pelayanan prima Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Berikut beberap rancangan program dan kegiatan untuk periode 2016-2021, dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai seperti uraian berikut ini :

Program pengembangan pemasaran pariwisata. Meliputi kegiatan :

- a. Pengembangan jaringan kerja sama promosi
- b. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara

Program pengembangan destinasi pariwisata. Meliputi kegiatan ;

- a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
- b. Pembersihan dan pemeliharaan lahan wisata
- c. Pengadaan Tanah Kawasan Peruntukkan Pariwisata

Program pengembangan kemitraan. Meliputi kegiatan :

- a. Pengembangan SDM dibidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
- b. Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata
- c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Selain itu Rencana Strategis ini disusun dengan mengacu kepada hasil evaluasi Rencana Strategis yang telah dilaksanakan pada 5 (lima) tahun yang lalu. Berikut rumusan strategi dan kebijakan dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata kota Dumai.

Tabel 1.1 Rencana Startegis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai th. 2016-2021

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya peningkatan kunjungan objek wisata	Peningkatan kunjungan objek wisata	Kunjungan Wisata - Domestic - Mancanegara	Peningkatan promosi pariwisata luar negeri dan dalam negeri	Pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing

Perencanaan pariwisata sangat penting dilakukan karena saat ini dan di masa depan akan terus terjadi pergeseran minat wisata. Motif, minat, selera, tuntutan, dan perilaku wisatawan terus menerus berubah dan perlu direspon dengan tepat. Salah satu daerah yang mulai melihat sektor pariwisata sebagai sektor yang menjanjikan untuk perkembangan daerah adalah Pariwisata di Kota Dumai . Pengembangan Objek Pariwisata salah satu kebijakan yang memiliki arti penting sebagai salah satu unsur peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain itu juga diketahui bahwa sektor wisata ini juga bisa lebih memperkenalkan potensi wisata daerah pada dunia luar terutama bagi sektor pariwisata.

Pengembangan Objek Wisata di Kota Dumai, harus diimbangi dengan pengelolaan yang maksimal oleh Pemerintah daerah karena sasaran yang ingin dicapai adalah berkembangnya kontribusi pariwisata yang begitu besar agar dapat menjadi tujuan wisata mancanegara yang siap bersaing ditingkat internasional. Pemerintah Daerah berwenang untuk mengelola kekayaan daerah yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi,

kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik daerah yang bersangkutan. Strategi pengembangan objek wisata harus dituangkan dalam produk formal agar dapat diimplementasikan dan dievaluasi.

Pengembangan sektor wisata dengan merencanakan serta membuat strategi dalam mengembangkan objek untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Maka untuk itu, setiap daerah diperlukan adanya strategi-strategi yang baik dan bijaksana yang tercipta dengan catatan perencanaan dan pengelolaan pengembangan pariwisata yang dipahami secara utuh dan berkesinambungan. Pengembangan pariwisata diharapkan bisa berfungsi sebagai tumpuan utama dalam pembangunan ekonomi, sehingga perlu adanya pengembangan pariwisata.

Pentingnya pemerintah di dalam pengembangan objek pariwisata dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah namun Dinas Pariwisata Kota Dumai dirasakan belum serius dalam mengembangkan objek wisata Pantai Teluk Makmur di Kota Dumai, dikarenakan belum diterapkannya strategi pengembangan pariwisata terhadap kemajuan pariwisata dengan maksimal.

Unsur Pemerintahan Kota Dumai di dalam penanganan pengembangan Pariwisata melalui Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata Kota Dumai mempunyai tugas yaitu memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Kota Dumai di Bidang Olahraga dan Pariwisata. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi antara lain pelaksanaan pengembangan Pariwisata. Kota Dumai memiliki potensi di sektor pariwisata, berikut disajikan dalam tabel objek wisata yang ada di Kota Dumai :

Tabel 1.2 Daftar Objek Wisata di Kota Dumai

NO.	OBJEK PARIWISATA	LOKASI
1	Pantai Purnama	Purnama, Dumai Barat, Kota Dumai
2	Pantai Teluk Makmur	Tlk. Makmur, Medang kampai Kota Dumai
3	Taman Bukit Gelanggang	Tlk. Binjai, Dumai Timur, Kota Dumai
4	Danau Bunga Tujuh	Jl. Soekarno Hatta, Kota Dumai
5	Hutan Wisata	Bukit Timah, Dumai Barat, Kota Dumai
6	Hutan Mangrove	Jl. Nelayan Laut, Kota Dumai
7	Taman Telaga Tirta	Bukit Datuk , Perum Pertamina, Kota Dumai
8	Bandar Bakau	Jl. Nelayan Laut, Kota Dumai
9	Pantai Marina Indah Puak	Kec. Medang Kampai, Kota Dumai
10	Pantai Koneng	Kec. Medang Kampai, Kota Dumai

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Dumai

Berdasarkan tabel diatas Objek Wisata Alam di Kota Dumai yang memiliki sepuluh objek wisata. Tentunya Peran Dinas Pariwisata lebih efektif dalam strategi pengembangannya dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari keseluruhan tempat wisata di Kota Dumai tentunya tidak terlepas dari strategi, kemampuan dan keterampilan kebijakan Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata Kota Dumai dengan berbagai upaya dan langkah-langkah yang dilakukan sehingga potensi kepariwisataan dapat dikenal oleh orang banyak serta dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Dari praobservasi awal yang dilakukan oleh penulis setelah memasuki beberapa objek wisata Pantai Teluk Makmur di Kota Dumai memiliki potensi alam yang menarik untuk dikembangkan sebagai objek wisata alam pada kawasan Provinsi Riau unggulan, memiliki pemandangan alam yang indah dengan karakteristik, ombak yang tenang, awan yang indah Panorama sunset dan bebatuan

dipesisir pantai, namun dalam pelestarian belum optimal sehingga perlu adanya pelestarian langsung dari masyarakat sekitar dan pemerintah setempat untuk meningkatkan pelestarian alam sehingga Objek Wisata Pantai Teluk Makmur Kota Dumai lebih diperhatikan fasilitas dan mampu mempromosikan pantai dan sumber lainnya. Banyak terdapat nya fasilitas yang tidak terawat menyebabkan gazebo maupun pondok-pondok yang telah dibuat sudah ada yang lapuk, serta terdapat rumput-rumput di sekitaran objek wisata yang sudah mulai Panjang dan semak, dan terjadinya karatan pada fasilitas-fasilitas yang ada akses jalan menuju pantai tidak terawat, terdapatnya sampah yang berserakan dan membuat area di sekitar pantai menjadi tidak bersih dan kotor dan jika ada wisatawan yang datang berkunjung, sangat terganggu dan merasa tidak nyaman ketika menggunakan fasilitas yang ada. Melihat permasalahan yang telah djelaskan di atas membuat kurangnya minat dan ketertarikan pengunjung sangat kurang untuk berwisata ke tempat wisata Pantai Teluk Makmur di Kota Dumai tersebut di karenakan kenyamanan bagi seorang pengunjung.

Berdasarkan penjelasan diatas Pemerintah Kota Dumai sudah selayaknya lebih serius memperhatikan tempat wisata dengan merealisasikan pengembangan objek wisata yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah.

Tabel 1.3 :Kegiatan Promosi Pariwisata Daerah Kota Dumai Tahun 2019-2021

No	Kegiatan	Keterangan
1	Mengikuti Pameran Tingkat Daerah	Tidak Terlaksana
2	Mengikuti Expo Tingkat Daerah	Tidak Terlaksana

3	Event Promosi	Tidak Terlaksana

Sumber : Hasil Pra Survey, 2021

Pada tabel diatas dapat dijelaskan untuk kegiatan pemasaran target wisata ataupun promosi wisata belum berjalan selama dua tahun terakhir hal ini terkendala akibat covid 19 melanda, namun belum ada upaya yang dilakukan agar tercapainya promowi wisata dengan cara lain.

Begitu juga strategi pengembangan pariwisata tidak terlepas dari kegiatan promosi pariwisata. Kesimpulan tabel diatas setelah penulis wawancara Kabid Dinas Olahraga dan Pariwisata untuk Kota Dumai terkait promosi pariwisata selama masa pandemi covid dua tahun ini tidak ada terlaksana sama sekali. Terakhir mengikuti expo pariwisata di Kota Batam yaitu tahun 2019, namun pada tahun 2020 dan 2021 tidak terlaksana. Lalu kegiatan event promosi juga tidak terlaksana dua tahun terakhir ini.

Penulis memfokuskan pada objek wisata Kota Dumai karena memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) dari sektor pariwisata. Kota Dumai memiliki salah satu sektor pariwisata yang cukup menarik untuk di datangi oleh wisatawan karena Kota Dumai sebagai tempat lalu lalang nya perdagangan negara dan juga masyarakat.

Ditambah lagi ada akses jalan yang mempermudah masyarakat untuk berkunjung ke tempat wisata. Dilihat dari kenyataannya, semenjak ada jalan tol Pekanbaru-Dumai banyak masyarakat dari luar Kota Dumai yang berkunjung untuk berwisata di beberapa objek wisata Kota Dumai, tentunya hal ini memiliki dampak

pada pengembangan objek wisata agar Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kualitas objek wisata di Kota Dumai. Di karenakan ada akses jalan Tol yang pertama kali dibuat di Riau hal ini membuat mudah nya masyarakat luar Kota Dumai yang berkunjung ke salah satu Objek Wisata Kota Dumai sehingga harus adanya strategi pengembangan Objek Wisata Kota Dumai.

Berdasarkan observasi yang ada di lapangan penulis menemukan beberapa fenomena permasalahan antara lain :

1. Belum adanya perhatian dari pemerintah Kota Dumai khususnya Dinas Pariwisata terhadap objek wisata yang ada di Kota Dumai.
2. Belum adanya kegiatan promosi yang berpengaruh terhadap pengembangan objek wisata Kota Dumai.
3. Belum adanya perawatan dan pembaharuan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur yang ada pada Pantai Teluk Makmur wisata di Kota Dumai.

Dari fenomena diatas yang penulis temukan dilapangan, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul : **“STRATEGI DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA DAERAH KOTA DUMAI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan penulis yang sudah dipaparkan maka penulis selanjutnya merumuskan masalah penelitian yang dihadapi adalah : **“Bagaimana Strategi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dalam Mengembangkan Pariwisata Daerah Kota Dumai”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi dinas Pariwisata Kota Dumai dalam pengembangan objek Pantai Teluk Makmur Pariwisata di Kota Dumai.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pengembangan objek wisata di Kota Dumai

b. Kegunaan

1. Akademis : Untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan serta menerapkan segala ilmu yang telah diperoleh terutama dalam Strategi Pengembangan Objek Wisata.
2. Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi referensi kepustakaan Ilmu Pemerintahan dan bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang yang sama.
3. Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan mutu. Strategi Pengembangan Objek Wisata di Kota Dumai.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Diangkat dari permasalahan diatas, mengenai Strategi Dinas Pariwisata dalam Mengembangkan Pariwisata Daerah Kota Dumai (Studi Kasus Pantai Purnama), maka penulis akan mengemukakan pembahasan di atas.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas itu dengan masyarakat lebih jauh ditegaskannya pemerintahan adalah segala daya upaya suatu Negara untuk mencapai tujuannya, (Musaneef, 2002;8)

Sedangkan pemerintahan adalah segala daya upaya suatu Negara untuk mencapai tujuannya. Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggara tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada, maka pemerintahan-pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada. (Musaneef,1992;15)

Pemerintahan menurut (Yusri Munaf 2015;47) adalah Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigm yang baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan

dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan bermasyarakat dalam suatu pemerintahan atau Negara. Proses pemerintahan dalam suatu Negara sangat bergantung pada bentuk pemerintahan Negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan pada Negara tersebut. Tentang bentuk pemerintahan, Robert Mac Iver mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang terdiri atas pemerintahan yang bersistem pada konstitusi demokrasi oligarki adalah system pemerintahan yang bergantung pada “penguasa tunggal” dengan kekuasaan eksklusif dan absolut. Pada awalnya bentuk bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh “raja” atau “ratu” sebagai penguasa turuntemurun yang memiliki kekuasaan eksklusif dan tak terbatas.

Menurut Inu Kencana (2011;36) “Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan seseorang memimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Syafiie (2005;20) Pemerintahan dalam arti sederhana hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan dalam pemerintahan dalam arti yang luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif) Fungsi pemerintah secara umum menurut Musanef (2002;22) adalah :

- a. menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan, pembangunan
- b. pembinaan masyarakat

Secara substantif, menurut Rasyid (2001;48), tugas pemerintahan dibagi dalam 3 fungsi pokok, yakni :

1. Pelayanan (service)
2. Pemberdayaan (empowerment)
3. Pembangunan (development)

Menurut Ndraha (2011;6) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan ini bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia maka berhak menerima layanan sipil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.

Menurut Ndraha (2003;75) fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam membuat undang mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintahan mempunyai tiga fungsi yaitu:

- a. Fungsi pengaturan

Fungsi ini dilakukan pemerintah dengan membuat perundang – undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat, karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya

b. Fungsi pemberdayaan

Fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan, kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan pada kalangan aparat itu sendiri agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup baik dan berkualitas.

Menurut Admosudirjo (2004;183), manajemen pemerintahan adalah manajemen yang merupakan lanjutan langsung daripada pemerintahan atau tindak pemerintahan (*government act*) yakni misalnya manajemen daripada government staff work, manajemen kepolisian, manajemen daripada legal drafting (penaskahan berbagai undang-undang, peraturan pemerintahan dan sebagainya)

Menurut Syafiie (2001;20) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni dikatakan karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan charisma menjalankan roda pemerintahannya, sedangkan dikatakan ilmu karena telah memenuhi syarat yaitu dapat dipelajari dan diajarkan secara langsung maupun tak langsung, memiliki objek, universal, sistematis dan spesifik.

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinas kelautan dan perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dibentuk berdasarkan desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan, bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Konsep Manajemen Pemerintahan

Taliziduhu ndraha (2003:158) mendefenisikan manajemen pemerintahan terlihat melalui ruang lingkup materi pokok kurikulumnya :

1. Asas dan sistem pemerintahan
2. Hukum tata Pemerintahan
3. Ekologi Pemerintahan
4. Filsafat dan Etika Pemerintahan
5. Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan adalah suatu kegiatan atau pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa dengan adanya tujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Konsep Organisasi Pemerintahan

Organisasi pelayanan publik merupakan suatu lembaga yang disediakan oleh pemerintah sebagai media untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah menyediakan suatu lembaga dengan membentuk sistem administrasi dan birokrasi yang baik agar menghasilkan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat, karena pelayanan publik merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat terhadap pemerintah dan negara (Canaldhy Rendy, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

Menurut Mahmudi (2010) organisasi pelayanan publik adalah suatu lembaga yang melaksanakan segala kegiatan pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Hanitasari Riris (2014) organisasi pelayanan publik adalah organisasi yang disediakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan kepada setiap warga negara, baik secara langsung (melalui sektor publik) atau dengan membiayai pemberian pelayanan swasta. Warga negara berharap pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Berdasarkan pernyataan diatas, disimpulkan bahwa organisasi pelayanan publik adalah suatu lembaga yang menyediakan pelayanan baik berbentuk barang maupun jasa kepada publik yang pada pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh instansi pemerintah pusat yang berkaitan dan berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan. Melalui pelayanan publik yang baik diharapkan mampu memenuhi

kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

5. Konsep Strategi

Strategi merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup dari suatu organisasi untuk mencapai sasaran atau tujuan yang efektif dan efisien, organisasi harus mampu menghadapi masalah-masalah atau hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan yang dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Di dalam dunia pemerintahan strategi sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi visi dan misi suatu organisasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) strategi memiliki makna sebagai berikut:

- 1) Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
- 2) Ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa(-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai
- 3) Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan

Selanjutnya menurut David (2011:18-19) Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan

sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Tjiptono (2006:3) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian Stoner, Freeman, dan Gilbert. Jr (2005), mengatakan konsep strategi dapat di definisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda yaitu: (1) dari perspektif apa suatu organisasi ingin dilakukan (*intends to do*), dan (2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (*eventually does*). Rangkuti (2013:183) berpendapat bahwa strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan Nawawi (2005:147) menuturkan secara etimologis (asal kata) penggunaan kata strategi dalam manajemen sebuah organisasi diartikan sebagai kiat, cara, dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan organisasi. Berbicara strategi tidak terlepas dari manajemen strategic. Menurut Siagian (2007:7), manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasi oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangkaian tujuan organisasi tersebut.

Dari beberapa definisi- definisi strategi tersebut penulis berpendapat bahwa strategi adalah sebuah perencanaan yang memiliki konsep- konsep tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan dengan melihat faktor eksternal dan internal suatu organisasi. Organisasi melakukan tindakan yang dapat menjadikan keuntungan baik untuk organisasi maupun pihak lain yang berkepentingan.

6. Konsep Dinas Pariwisata

Tugas dan fungsi utama dinas daerah yang memberi pelayanan kepada masyarakat tanpa batas-batas tertentu dapat digunakan sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dan menghasilkan imbalan (Riwu,1997). Dinas Pariwisata Daerah sebagai salah satu dinas daerah adalah organisasi pariwisata daerah yang merupakan bagian dari dinas daerah dan bertugas sebagai unsurepelaksanaan daerah dalam menjalankan roda pembangunan dan pemerintah daerah di sektor pariwisata. Secara umum Dinas Pariwisata merupakan satuan kerja di lingkungan kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berfungsi mengelola, melestarikan, mempromosikan dan memasarkan serta mengembangkan potensi pariwisata di daerah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyusunan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, pada Bab II Pasal 3 disebutkan bahwa Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pariwisata Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pariwisata
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pariwisata
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata
4. Pelaksanaan pengembangan pariwisata, pembinaan karakter dan pekerti bangsa
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pariwisata
6. Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata
7. Pelaksanaan rencana induk dan pengembangan pariwisata dan sumber daya manusia
8. Pelayanan administratif.

7. Konsep Kepariwisataan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1, Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Adapun asas, fungsi, tujuan kepariwisataan menurut Undang- Undang 10 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Asas manfaat, asas kekeluargaan, asas adil dan merata, asas keseimbangan, asas kemandirian, asas kelestarian, asas partisipatif, asas berkelanjutan, asademokratis, asas kesetaraan, asas kesatuan.

- b. Fungsi kepariwisataan adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- c. Tujuan kepariwisataan meliputi:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- 3) Menghapus kemiskinan
- 4) Mengatasi pengangguran
- 5) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- 6) Memajukan kebudayaan
- 7) Mengangkat citra bangsa
- 8) Memupuk rasa cinta tanah air
- 9) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
- 10) Mempererat persahabatan antar bangsa

Menurut Leiper dalam Ismayati (2009), terdapat tiga elemen utama yang menjadikan kegiatan kepariwisataan tersebut bisa terjadi yakni:

1. Wisatawan

Adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi dan mengingatkan masa-masa di dalam kehidupan.

2. Elemen Geografi

Pergerakan wisatawan berlangsung pada tiga area geografi, seperti berikut ini :

- 
- a) Daerah Asal Wisatawan (DAW), daerah tempat asal wisatawan berada ketika melakukan aktivitas keseharian, seperti bekerja, belajar, tidur dan kebutuhan dasar lain. Rutinitas itu sebagai pendorong untuk memotivasi seseorang berwisata. Dari DAW, seseorang dapat mencari informasi tentang obyek dan daya tarik wisata yang diminati, membuat pemesanan dan berangkat menuju daerah tujuan.
- b) Daerah Transit (DT), tidak seluruh wisatawan harus berhenti di daerah itu. Namun, seluruh wisatawan pasti akan melalui daerah tersebut sehingga peranan DT pun penting. Seringkali terjadi, perjalanan wisata berakhir di daerah transit, bukan di daerah tujuan.
- c) Daerah Tujuan Wisata (DWT), daerah ini sering dikatakan sebagai *sharp end* (ujung tombak) pariwisata. Di DWT ini dampak pariwisata sangat dirasakan sehingga dibutuhkan perencanaan dan strategi manajemen yang tepat. Untuk menarik wisatawan, DWT merupakan pemacu keseluruhan sistem pariwisata dan menciptakan permintaan untuk perjalanan dari DAW. DWT juga merupakan *raison d'être* atau alasan utama perkembangan pariwisata yang menawarkan hal-hal yang berbeda dengan rutinitas wisatawan.

8. Konsep Objek Wisata

Objek dan daya tarik wisata merupakan salah satu unsur penting dalam dunia kepariwisataan. Objek dan daya tarik wisata dapat menyukseskan program pemerintah dalam melestarikan adat dan budaya bangsa sebagai aset yang dapat dijual kepada wisatawan. Obyek dan daya tarik wisata menurut Undang-undang No 10 tentang kepariwisataan yaitu Daya Tarik Wisata (DTW) adalah segala sesuatu

yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan (Muchamad Zaenuri, 2012:6)

Menurut SK Menparpostel No. KM 98 PW. 102 MPPT – 87 objek wisata adalah suatu tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya alam yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik yang diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan”. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa objek wisata merupakan segala sesuatu yang dapat bernilai untuk dikunjungi, serta mempunyai daya tarik tertentu, baik dilihat dari segi keunikan dan nilai yang tinggi yang menjadi tujuan wisata untuk mengunjungi daerah tersebut.

9. Konsep Strategi Pengembangan Objek Wisata

Dalam penelitian ini, pengembangan diartikan sebagai proses atau perbuatan pengembangan dari suatu hal yang sebelumnya belum ada, dari yang sudah ada menjadi lebih baik dan dari yang sudah baik menjadi lebih baik, demikian dalam konteks objek yang sedang diteliti, yaitu kawasan Objek Wisata di Kota Dumau. Menurut Undang-undang No 10 tentang kepariwisataan yaitu Daya Tarik Wisata (DTW) ada beberapa komponen dasar pariwisata yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata dan pedoman Analisis Daerah Operasi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam (ADOODTWA) Dirjen PHKA tahun, komponen tersebut antara lain :

a. *Attraction* (Daya Tarik)

Daya tarik wisata memiliki kekuatan tersendiri sebagai komponen pariwisata karena dapat memunculkan motivasi bagi wisatawan dan menarik wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Suatu daerah dikatakan memiliki daya tarik wisata apabila memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

1. Keunikan;
2. Keaslian, alam atau adat yang melekat pada kehidupan masyarakat sehari-hari
3. Kelangkaan, sulit ditemui di daerah atau negara lain;
4. Menumbuhkan semangat dan memberi nilai wisatawan

b. *Accessible* (Mudah Dicapai)

Dalam hal ini dimaksudkan agar wisatawan domestik dan mancanegara dapat dengan mudah mencapai tempat wisata tersebut. Ketersediaan transportasi merupakan sesuatu yang sangat dalam dunia perdagangan. Hal ini juga diperlukan dalam pengembangan pariwisata.

c. *Amenities* (Fasilitas)

Fasilitas yang tersedia di daerah objek wisata seperti akomodasi dan restoran. Fasilitas menjadi salah satu syarat Daerah Tujuan Wisata (DTW). Dengan adanya fasilitas, maka wisatawan dapat tinggal lebih lama di daerah tersebut.

d. *Ancillary* (Adanya Lembaga Pariwisata)

Aspek berikut ini mengacu kepada adanya lembaga atau organisasi yang mengolah objek wisata tersebut. Wisatawan akan semakin sering mengunjungi dan mencari DTW (Daerah Tujuan Wisata) apabila di daerah tersebut wisatawan dapat

merasakan kenyamanan (*Protection of Tourism*) dan terlindungi baik melaporkan maupun mengajukan suatu kritik dan saran mengenai keberadaan mereka selaku pengunjung atau orang yang bepergian. Pengembangan pariwisata selain mencapai tujuan internasional juga mencapai tujuan nasional yang meliputi :

- 1) Persatuan dan kesatuan identitas nasional Indonesia.
- 2) Pengertian umum kelembagaan nasional dan dari kewajiban penduduk.
- 3) Kesehatan dan kesejahteraan umum.
- 4) Pertumbuhan ekonomi dan redistribusi pendapatan nasional yang seimbang.
- 5) Perhatian umum terhadap lingkungan.
- 6) Preservasi tradisi daerah serta minoritas.
- 7) Perlindungan dari hak perseorangan untuk berlibur.

Jika ditilik lebih lanjut dalam aspek daya tarik wisata, maka Edward Inskeep (1991) membagi daya tarik dan kegiatan wisata dalam 3 kategori, yaitu :

1. Daya tarik alam, yang meliputi iklim, keindahan alam, pantai, flora dan fauna, karakter khas lingkungan, taman dan kawasan konservasi, serta wisata kesehatan.
2. Daya tarik budaya, yang meliputi tapak arkeologis, kesejarahan dan budaya, pola-pola kebudayaan yang khas, kesenian dan kerajinan, kegiatan ekonomi khas, kawasan perkotaan spesifik, fasilitas budaya dan museum, festival budaya, serta keramahmataman masyarakat penghuni.
3. Daya tarik khusus, atau kadang disebut daya tarik buatan, meliputi theme parks, amusement parks dan sirkus, wisata belanja, MICE (meeting,

incentive conventions, and exhibitions), kegiatan khusus, hiburan, rekreasi dan olah raga.

Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Untuk dapat meningkatkan potensi pariwisatanya, yang perlu dilakukan adalah merencanakan pengembangan wisata agar dapat lebih baik dari sebelumnya. Tiga prinsip utama dalam sustainability development (McIntyre, 1993: 10):

1. Ecological Sustainability, yakni memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan sesuai dengan proses ekologi, biologi, dan keragaman sumber daya ekologi yang ada.
2. Social and Cultural Sustainability, yaitu memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar dan sesuai dengan kebudayaan serta nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat tersebut.
3. Economic Sustainability, yaitu memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan efisien secara ekonomi dan bahwa sumber daya yang digunakan dapat bertahan bagi kebutuhan di masa mendatang.

Sementara itu dilain hal, sektor pariwisata terdiri atas beberapa komponen yang berbeda yang harus benar-benar dimengerti dan direncanakan dan dikembangkan secara terintegrasi dalam masyarakat. Segalanya untuk kenyamanan perencanaan pariwisata dalam masyarakat itu sendiri, komponen-komponen pendekatan pengembangan pariwisata menurut Edward Inskeep (1998) yang dikutip dari Inskeep (1991:38) , bahwa untuk menyusun suatu

pengembangan pariwisata yang komprehensif diperlukan indikator adalah sebagai berikut :

- a. Pangsa Pasar
- b. Tourist Attraction
- c. Infrastruktur
- d. Aksesibilitas
- e. Fasilitas dan Pelayanan Wisata

Pengembangan adalah suatu usaha yang dilakukan manusia untuk mengembangkan personalitas dan fasilitas suatu objek sehingga kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan baik dan optimal. Nadjamuddin, Ramly (2007). Sedangkan menurut Bakaruddin (2008) adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia sebagai subyek untuk mengarahkan perubahan yang terjadi pada suatu obyek. Pengembangan bisa juga diartikan sebagai perubahan kearah yang lebih komplek. Maisardi (2005) mengemukakan bahwa manajemen pengelolaan objek wisata adalah kegiatan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, pihak swasta atau masyarakat dalam rangka menjadikan objek wisata tersebut nyaman untuk dikunjungi oleh wisatawan.

Bentuk pengelolaan yang dapat dilakukan dengan cara menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang sifatnya tidak merubah keaslian kawasan objek wisata itu sendiri, bisa saja pemerintah atau pihak swasta melakukan aktifitas pembangunan fisik sebagai sarana penunjang tetapi tetap harus memperhatikan aspek ekologis, demografis, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan pengembangan adalah upaya memperluas atau mewujudkan potensi-potensi, membawa suatu keadaan secara bertingkat kepada suatu keadaan yang lebih lengkap, lebih besar atau lebih baik, memajukan sesuatu dari yang lebih awal kepada yang lebih akhir dan dari yang sederhana kepada yang lebih kompleks. Dan dapat disimpulkan yang dimaksud dengan manajemen pengelolaan kawasan objek wisata dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat maupun swasta terhadap kawasan objek wisata berupa pembenahan dan penyediaan sarana dan prasarana berupa akomodasi dan atraksi tanpa merubah keaslian dari kawasan objek wisata tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Permasalahan yang hampir sama juga pernah diteliti oleh mahasiswa terdahulu sebelum peneliti, namun tetap ada perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sekarang. Untuk itu berikut ini adalah beberapa referensi penelitian terdahulu dengan permasalahan yang hampir sama :

Tabel II.I : Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No	Peneliti/Tahun/Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	1	2	3
1	AdamMuakhor/2008/Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Randusan Indah Kabupaten Brebes Sebagai Objek Wisata Unggulan	Penelitian ini memiliki persamaan tentang bagaimana cara pengembangan objek pariwisatanya	Perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian, objek penelitian dan teori penelitian.
2	Zuzi Maima Zura/2018/Pengelolaan Objek Wisata di Kecamatan Kuok oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar	Penelitian ini sama sama meneliti Dinas Pariwisata dan memiliki teori yang sama yaitu kualitatif	Perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian, objek penelitian dan teori penelitian.
3	G. Lianse/2016/Strategi Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengembangan Pariwisata Lumbok Ranau untu Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat	Persamaan penelitian ini yaitu sama sama meneliti tentang Pengembangan Pariwisata	Perbedaan penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian, metode penelitian yaitu metode analisis deskriptif, objek penelitian.
4	Andri Oktosilva/2018/Strategi Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata di Tana Toraja	Persamaan penelitian ini yaitu sama sama meneliti tentang pengembangan pariwisata	Perbedaan penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian, objek penelitian
5	Vina Wahyuni/2016/Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Air Manis di Kelurahan Air Manis Kecamatan Padang Selatan Kota Padang	Penelitian ini memiliki persamaan tentang bagaimana cara pengembangan objek pariwisatanya	Penelitian ini memiliki persamaan tentang bagaimana cara pengembangan objek pariwisatanya

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari permasalahan yang penulis paparkan pada latar belakang, kemudian dengan mengacu pada beberapa konsep dan teori yang diuraikan pada studi keperpustakaan yang selanjutnya dijadikan indikator penelitian dari fenomena yang terjadi, maka penulis akan menjelaskan kerangka pikir sebagai bentuk dari konsep. Tujuan pembuatan kerangka pikir ini agar memberikan gambaran yang lebih jelas permasalahan penelitian serta menghindari terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian serta menggambarkan bagaimana penulis melihat ini.

Gambar II.I : Kerangka Pikir Tentang Strategi Dinas Pariwisata dalam Mengembangkan Pariwisata Daerah Kota Dumai



D. Konsep Operasional dan Operasional Variable

1. Konsep Operasional

1. Strategi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat .
2. Pengembangan kepariwisataan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar, objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.
3. Pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah untuk membuat atau memperbaiki, sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya untuk menciptakan mutu yang lebih baik.
4. Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata Kota Dumai dalam penelitian ini sebagai pelaksana strategi pengembangan objek wisata di Kota Dumai.
5. Pangsa Pasar adalah bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya, seperti tingkat pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, status sosial.
6. Tourist Attraction/ Objek Wisata adalah tempat yang menarik dimana wisatawan berkunjung, biasanya karena nilai budaya atau alam nya yang melekat atau dipamerkan, signifikan historis, keindahan alam atau yang dibangun, menawarkan hiburan.

7. Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas dan dibawah permukaan tanah.
8. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
9. Fasilitas dan pelayanan wisata merupakan pelengkap daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dari wisatawan yang sedang menikmati perjalanan wisata dan kegiatan yang bertujuan memberikan kemudahan, kenyamanan, atau keselamatan kepada pengunjung selama tinggal dan dalam setiap acara kunjungannya di kawasan pelestarian
10. Sarana objek wisata adalah merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya.
11. Masyarakat dan lingkungan adalah terdiri dari masyarakat, lingkungan dan budaya di daerah objek wisata.

E. Operasional Variabel

Definisi Operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepadakita tentang bagaimana caranya mengukur Variable. Definisi opsional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana cara mengukur suatu variable.

Tabel II.2 : Strategi Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Pariwisata Daerah Kota Dumai

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Strategi adalah merupakan cara untuk mencapai sasaran jangka panjang, dengan menjembatani masa kini dan masa depan yang memperbesar kemungkinan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Rangkuti,2006:7)	Pengembangan Objek Wisata Daerah Di Kota Dumai (Konsep Pengembangan Menurut Edward Inskeep (1991:38)	Pangsa Pasar	a. Wisatawan Asing b. Wisatawan Nasional c. Wisatawan Lokal
		Tourist Attraction	a. Nilai Sejarah b. Keaslian c. Panorama Alam d. Flora & Fauna e. Skala Event (atraksi)
		Infrastruktur	a. Sarana Prasarana Penunjang b. Kebersihan Objek c. Ketersediaan Akomodasi
		Aksesibilitas	a. Transportasi di dalam objek b. Transportasi di luar
		Fasilitas dan Pelayanan Wisatawan	a. Ketersediaan Makanan dan Minuman b. Kelengkapan c. Kualitas makanan dan minuman d. Pelayanan Informasi e. Sistem Penanganan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penggalan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada objek atau informan dalam penelitian, selain itu melakukan observasi langsung mengenai objek penelitian. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi tanpa menambah dan mengurangi. Menurut Creswell (2010:19) penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata Kota Dumai, adapun alasan penulis melakukan penelitian di tempat ini karena Kota Dumai merupakan memiliki destinasi pariwisata yang mana daerah ini yang memiliki peluang dalam pengembangan pariwisata.

C. Informan

Amirin (1989) Informan merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenaunya ingin diperoleh keterangan. Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* sampling yang dimana peneliti memilih informan kunci atau informan yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian serta terjun langsung pada ranah penelitian yang penulis laksanakan guna mengetahui secara jelas dan nyata mengenai strategi dinas pariwisata dalam pengembangan objek wisata daerah di Kota Dumai

Tabel III.1 Informan

Informan	Jumlah
1. Kepala Bidang Pariwisata	1
2. Kepala Seksi Promosi Objek Wisata	1
3. Kepala Seksi pengawasan Objek Wisata.	1
4. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	1
5. Pelaku Usaha Pariwisata	1
6. Masyarakat Pengunjung	3

D. Teknik Penarikan Informan

Informan adalah orang-orang yang diamati dan memberikan data dan informasi, serta yang mengerti akan permasalahan yang akan diteliti. Pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang mana penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih mengetahui dan terlibat serta telah ditentukan sebelumnya.

E. Jenis Dan Sumber Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan pada penelitian inovasi dinas pariwisata kota Dumai dalam pengembangan objek pariwisata di kota Dumai penulis membagi ke dua bagian :

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari para responden, berupa data yang belum di olah. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup fungsi Dinas Pariwisata, sumber-sumber kegiatan, serta sumber pendapatan (insetif) yang diperoleh Dinas Pariwisata.
2. Data sekunder ,Pengertian data sekunder menurut (Uma sekaran,2011), adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang jelas dan lengkap dalam suatu penelitian maka peneliti di tuntut kemampuannya untuk memilih Teknik yang efektif dan efesien. Atas dasar itu maka untuk memperoleh data yang lengkap dan objektif penyusunan dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Pengamatan/Observasi , yaitu suatu Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti. Teknik ini bermanfaat untuk mendapatkan serta mengetahui sejumlah peristiwa penting yang tidak mungkin bisa diperoleh dengan Teknik kuosioner dan interview, maka dapat di amati dengan observasi langsung.
2. Teknik Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab langsung dengan responden berkaitan dengan objek penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam pencatatan atau mengambil gambar-gambar dari dokumen-dokumen yang terdapat ditempat penelitian dan yang ada hubungan.

G. Teknik Analisis Data

Bogdan dalam Sugiyono (2013:244) menyatakan bahwa, Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Pedoman wawancara dengan cara beberapa data yang diperoleh dari pertanyaan yang diajukan saat wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara

dikumpulkan. Selanjutnya sumber data dari informan yang ditunjuk melalui tahap proses klasifikasi dan reduksi data.

Semua data yang telah di peroleh dalam penelitian lalu dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan bahan masukan dalam penelitian ini. Kemudian data tersebut di olah, di presentasikan untuk dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan data yang ada guna dilakukan Analisa kualitatif, kemudian di interprestasikan dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian



Tabel III.2 : Jadwal Penelitian Tentang Strategi Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Pariwisata Daerah Kota Dumai.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021/2022																	
		Oktober-November				Desember-Januari				Februari-Maret				April-Mei				Juni-Juli	
1	Persiapan dan Penyusunan UP																		
2	Seminar UP																		
3	Revisi Up																		
4	Penelitian Lapangan																		
5	Analisis Data																		
6	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																		
7	Konsultasi Revisi Skripsi																		
8	Ujian Skripsi																		
9	Revisi Skripsi																		
10	Pengandaan Skripsi																		

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Dumai

1. Sejarah Singkat Kota Dumai

Kota Dumai merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau ditinjau dari letak geografis. Kota Dumai terletak antara 1023-1024'23" Bujur Timur dan 101023'37"-101028'13 Lintang Utara dengan Luas Wilayah 1.727,38 Km². Kota Dumai memiliki Tujuh (7) Kecamatan dan 40 Kelurahan. Batas Administratif Kota Dumai sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir

Kota Dumai adalah sebuah Kota di Provinsi Riau, Indonesia sekitar 188 Km dari Kota Pekanbaru. Kota Dumai memiliki luas wilayah 1.727,38 Km². Sebelumnya Kota Dumai merupakan Kota terluas Nomor 2 (dua) di Indonesia setelah Manokwari. Namun semenjak Manokwari pecah dan terbentuk Kabupaten Wasiun, maka Kota Dumai pun menjadi yang terluas. Tercatat dalam sejarah. Dumai adalah sebuah dusun kecil di Pesisir Timur Sumatera. Nama Dumai menurut cerita Rakyat tentang putri Tujuh, berasal dari Kota di Lubuk dan Umai (Sejenis Binatang Landak) yang mendiami lubuk tersebut. Karena diucapkan cepat, lama kelamaan kata- kata tersebut bertaub menjadi D' Umai dan selanjutnya menjadi Dumai.

Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, diresmikan sebagai Kota pada 20 April 1999, dengan UU No. 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai tanggal 20 April 1999, setelah sebelumnya sempat menjadi Kota Administratif (kotif) di dalam Kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 9 Desa dengan jumlah penduduknya 15. 699 Jiwa dengan tingkat kepadatan 83, 85 Jiwa/Km². Saat ini Kota Dumai sebagai Kota yang masuk dalam zona Pasar Bebas International. Dulu Dumai hanyalah sebuah dusun nelayan yang sepi, berada di Pesisir Timur Provinsi Riau, Indonesia. Kini, Dumai sangat ramai sejak tahun 1999. Kapal- kapal tangka minyak raksasa setiap harinya singgah dan merapat di pelabuhan ini. Kilang- kilang minyak yang tumbuh menjamur di sekitar pelabuhan menjadi Kota Dumai malam hari gemerlapan bak permata berkilauan.

Pada era 1930-an. Dumai merupakan suatu dusun nelayan kecil yang terdiri atas beberapa rumah nelayan. Penduduknya bertambah ketika Jepang mendatangkan kaum Romusha (Pekerja Paksa Zaman Penjajahan) dari Jawa. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan status Dumai sebagai berikut :

1. Tahun 1945-1959, Status Dumai tercatat sebagai Desa.
2. Tahun 1959-1963, Dumai masuk dalam wilayah kecamatan Rupert.
3. Tahun 1963-1964, Dumai berpisah dari Kecamatan Rupert dan berubah status menjadi kewadanan.
4. Berdasarkan PP No.8 Tahun 1979 tentang Pembentukan Kota Adminsitratif Dumai tertanggal 11 April 1979, dumai berubah menjadi

Kota Administratif (merupakan kota Adminsitratif pertama di Sumatera dan ke-11 di Indonesia) dibawah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Bengkalis.

5. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kota Madya daerah Tingkat II Dumai tanggal 20 April 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3829), Dumai berubah menjadi Kota Dumai. Maka jabatan Walikota Dumai pertama dari tanggal 27 April dijadikan hari Ulang Tahun Kota Dumai.
6. Terdapat beberapa filosofis yang cukup mendasar atas peningkatan status Kota Dumai dalam tatanan pengelolaan wilayah administratif pemerintahan, diantaranya adalah untuk memperpendek tentang kendali pemerintahan, mempercepat tingkat pelayanan serta memperbesar peran dari masyarakat dalam upaya pembangunan pemerintahan.

Pengelolaan proses pembangunan dan upaya pemberdayaan masyarakat, disamping itu juga untuk menangkap berbagai peluang dan pengembangan ekonomi, Didalam sejarah Kota Dumai pernah menjadi Kota paling luas Nomor 2 (Dua) di Indonesia setelah Manokwari di Papua. Akan tetapi, semenjak Kota Manokwari pecah dan kemudian terbentuk Kabupaten Wasior, maka Kota Dumai menjadi Kota Terluas di Indonesia. Dalam catatan sejarah, Dumai merupakan sebuah dusun kecil didaerah Pesisir Timur Pulau, Kota Dumai juga dijuluki dengan Kota Pengantin Berseri adalah singkatan dari (Pelabuhan, Perdagangan, Tourism dan Industri) Berseri (Bersih, Semarak, Rukun dan Indah).

2. Topografi

Secara geografis, Kota Dumai terletak di 1023-1024'23" Bujur Timur dan 101023'37"-101028'13 Lintang Utara dengan batas wilayah sebelah Utara. Dumai berbatasan dengan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis sebelah Timur. Dumai berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dan Sebelah Barat, Dumai berbatasan dengan Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Wilayah Kota Dumai beriklim Tropis dengan curah hujan antara 100-300 cm dan suhu udara 24-33°C dengan kondisi tanah rawa bergambut. Periode musim kering (musim kemarau) biasanya terjadi antara bulan Februari hingga Agustus.

3. Pemerintahan

Berdasarkan Undang- undang Nomor 16 Tahun 1999, Dumai Barat merupakan wilayah administratif Kota Dumai yang memiliki 4 Kelurahan dan mempunyai jumlah penduduk 47. 364 jiwa. Pada setiap kelurahan dipimpin oleh Seorang Lurah, dalam menjalankan tugasnya, lurah dibantu oleh beberapa stafnya dan telah dilengkapi dengan kepala urusan yang membantu dalam urusan pemerintahan.

4. Penduduk

Masalah penduduk dikecamatan Dumai Barat sama halnya dengan Daerah lain. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang kurang terkendali, sulit tercapai Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang harus ditingkatkan. Penduduk

di Kecamatan Dumai Barat pada tahun 2019 berjumlah 47.364 jiwa, yang terdiri dari 21. 269 jiwa penduduk laki-laki dan 21. 095 jiwa penduduk perempuan.

5. Sosial

a. Pendidikan

Berhasil atau tidak berhasilnya suatu pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia yang dimilikinya, semakin maju pendidikan akan meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah tersebut. Demikian pentingnya peranan pendidikan, maka sudah sewajarnya pemerintah memberi perhatian yang lebih untuk dunia pendidikan.

b. Pertanian dan Perkebunan

Tanam pangan meliputi luas panen dan produksi tanaman bahan makanan sayur-sayuran dan buah-buahan diperoleh dari Dinas Pertanian, perkebunan dan kehutanan Kota Dumai. Sedangkan perkebunan mempunyai kedudukan yang penting didalam pengembangan pertanian baik ditingkat nasional maupun regional. Jenis tanaman pangan dan perkebunan yang ada di Kota Dumai yaitu padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Tanaman perkebunan yang merupakan tanaman yang sangat potensial di daerah ini adalah kelapa sawit. Sungai Sembilan merupakan penghasil sawit terbesar, sedangkan untuk penghasil padi terbesar juga terdapat pada Kecamatan Sungai Sembilan.

c. Peternakan

Pembangunan sub sector peternakan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat disamping

meningkatkan pendapatan peternakan. Di kecamatan Dumai Barat terdapat ternak sapi dan kambing sekitar 1.124 ekor dan kambing 2.006 ekor.

d. Industri

Kota Dumai terkenal dengan sebutan Kota Tambang Minyak, bermula dari serikat Indonesia standar oil California (Socal) atau PT.CPI menetapkan kawasan pantai Dumai sebagai alternatif pelabuhan untuk mengembangkan industrinya. Hal ini berdampak positif terbukti dari tahun ke tahun kawasan ini berkembang pesat. Perkembangan berbagai bidang industri yang disebut dengan Kawasan Industry Dumai (KID) yaitu terdiri dari kawasan industry pelintung seluas 5.008 hektar, kawasan industry Lubuk Gaung yang terdapat disungai sembilang seluas 2.158 hektar, kawasan industri bukit kapur di Kecamatan Bukit Kapur seluas 115 hektar dan kawasan industry Terpadu Dock Yard seluas 300 hektar.

B. Gambaran Umum Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

1. Sejarah Singkat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

Kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) tahun 2005 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Dasar pertimbangan dibentuknya Dinas tersebut adalah Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melakukan ketentuan pasal 11 Undang-Undang tersebut dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Penyusunan kelembagaan perangkat daerah saat ini, mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8

Tahun 2003 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yang ada prinsipnya sebagai arah yang jelas dalam menata organisasi Daerah Kota Dumai. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Peraturan Daerah (Perda) tersebut dibentuk, yang ditetapkan tanggal 6 Desember 2005 oleh Walikota Dumai.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata merupakan suatu unsur Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok menjalankan kegiatan pemerintahan terutama dalam Bidang Pariwisata. Maka dari itu diperlukan susunan organisasi dan tata kerja yang baik guna menyelenggarakan tugas Pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara terperinci dan sistematis. Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai No. 63 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Pada Bidang Pariwisata didalam pasal 25 ayat (1) menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyiapan bahan untuk menjadi pertimbangan dalam hal pemberian rekomendasi atau izin usaha pariwisata.
- b. Penyiapan bahan penyelenggaraan promosi publikasi pelayanan informasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan pelaku-pelaku lin baik dalam lingkup nasional dan internasional.
- c. Penyiapan bahan rencana pengembangan usaha objek dan daya tarik wisata.

Dan bagian Susunan Organisasi Bidang Pariwisata terdiri dari :

- b) Seksi Pengawasan Objek Wisata
- c) Seksi Sarana Pariwisata
- d) Seksi Promosi Pengembangan Wisata

Adapun uraian tugas masing- masing seksi- seksi pada Bidang Pariwisata dibawah ini :

a. Seksi Pengawasan Objek Wisata

1. Seksi Pengawasan Objek Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a, mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan dan pengembangan objek wisata pelestarian, pemeliharaan dan pengawasan objek dan daya tarik wisata (odtw)
2. Uraian tugas Seksi Pengawasan Objek Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a) Menyiapkan dan melaksanakan serta mempelajari seluruh beban kerja dengan cara meneliti dan mencatat hal-hal yang dianggap penting dalam melaksanakan tugas.
 - b) Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi pemasukan-pemasukan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - c) Menyiapkan bahan penelitian kelayakan teknis objek dan daya tarik wisata.
 - d) Menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan evaluasi perkembangan usaha pariwisata, standar mutu produk dan ketenagakerjaan.
 - e) Menyusun rencana kerja seksi dengan mempedomani rencana kerja tahunan serta petunjuk yang diberikan atasan
 - f) Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.

- g) Menyiapkan bahan penyusunan laporan tertulis secara periodik atas pelaksanaan tugasnya dan,
- h) Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Seksi Sarana Pariwisata

1. Seksi Sarana Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b, mempunyai tugas melakukan kegiatan pengembangan pemantauan, pengawasan dan pengendalian usaha dan prasarana pariwisata.
2. Uraian tugas seksi sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a) Menyiapkan dan melaksanakan penetapan dan pemungutan retribusi dan daftar ulang usaha prasarana pariwisata.
 - b) Memberikan dan mengarahkan bawahan dengan cara lisan atau tulisan yang dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
 - c) Merumuskan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian pada pembinaan, terhadap semua upaya kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - d) Menyusun rencana kerja seksi dengan mempedomani rencana kerja tahunan serta petunjuk yang diberi atasan
 - e) Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
 - f) Menyiapkan bahan penyusunan laporan tertulis secara periodik atas pelaksanaan tugasnya

g) Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Seksi Promosi Pengembangan Wisata

1. Seksi Promosi Pengembangan Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf c, mempunyai tugas melakukan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan dukungan dalam rangka promosi, pemasaran dan penyuluhan objek dan kegiatan wisata guna meningkatkan kunjungan wisata ke daerah.
2. Uraian tugas Seksi Pengembangan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan promosi dan penyuluhan dalam negeri dan luar negeri.
 - b. Menyiapkan bahan-bahan dan penertiban buletin pariwisata, melakukan analisis pemasaran dan penyuluhan serta bekerjasama dengan media cetakan elektronik
 - c. Menyiapkan dan melaksanakan serta mempelajari seluruh bahan-bahan kerja dengan cara meneliti dan mencatat hal-hal yang dianggap penting dalam melaksanakan tugasnya.
 - d. Menyusun rencana kerja seksi dengan mempedomani rencana kerja tahunan serta petunjuk atasan
 - e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
 - f. Membuat laporan secara berkala kepada atasan sesuai dengan tugasnya

- g. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

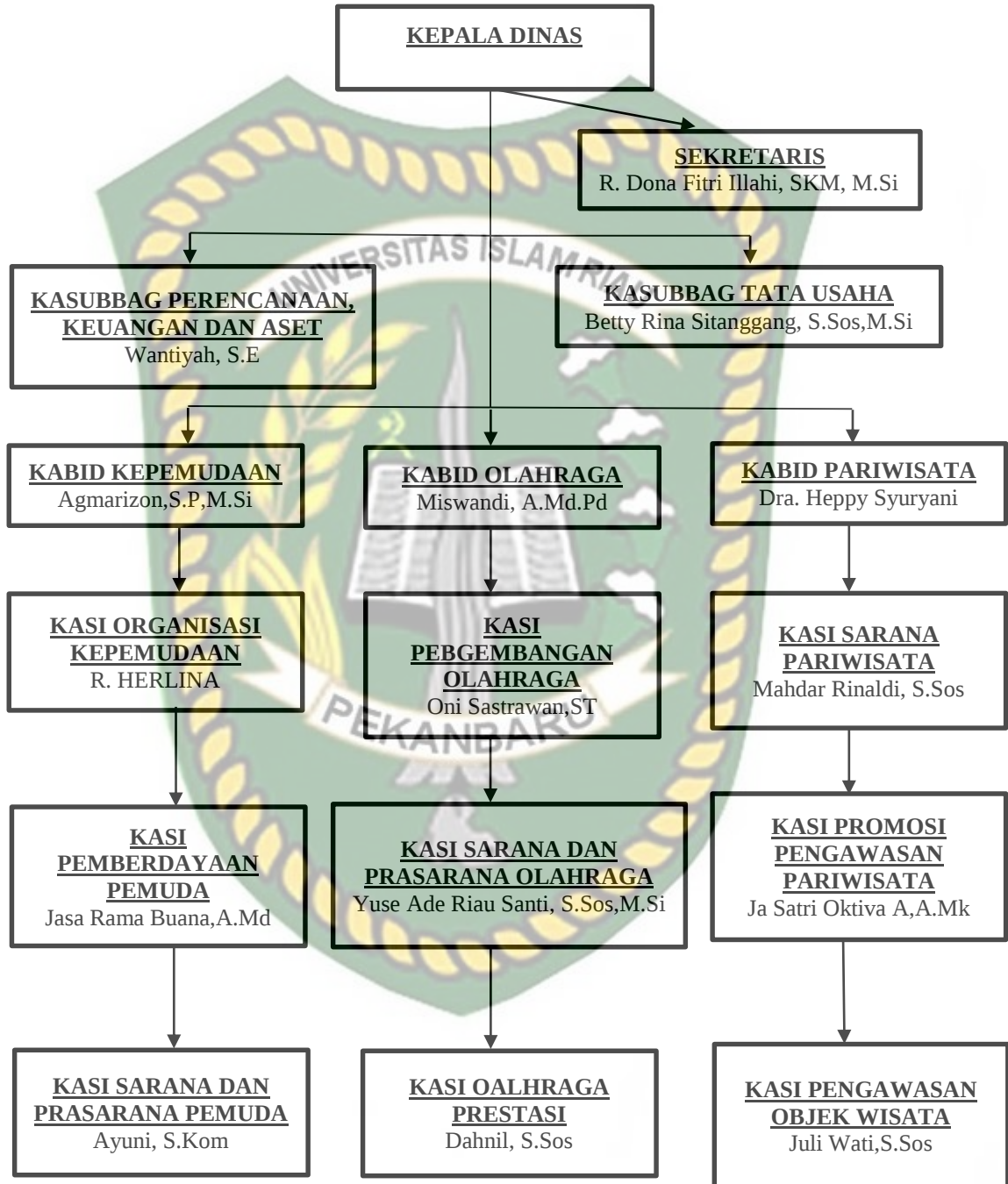
C. Struktur Organisasi

Dengan struktur tugas masing- masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi- misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran didalamnya. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Dumai No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, maka struktur Organisasi Kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai adalah sebagai berikut:



Gambar IV. I

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai



Sumber : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2022

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Strategi Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Pariwisata Daerah Kota Dumai. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil key informan dan informan yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

Tabel V.1 : Data Kunjungan Wisatawan Kota Dumai

Kunjungan Wisatawan	2019	2020	2021
Wisatawan Domestik	81.202	39.325	30.118
Wisatawan Mancanegara	13.245	3.834	1.638
Jumlah	94.447	43.159	31.756

Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, 2022

A. Identitas Informan

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan Informan beserta hasil jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara dari Informan. Dalam pelaksanaan wawancara yang sudah disajikan kepada informan, maka langkah awal yang harus dipenuhi mengetahui identitas informan, Identitas informan merupakan keterangan yang diperoleh dari wawancara sebagai sumber memperoleh data dan informasi. Penelitian sangat penting dijelaskan identitas penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian itu adalah asli dan hasilnya dapat di

pertanggung jawabkan karena penelitian yang jelas, pasti telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Strategi Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Pariwisata Daerah Kota Dumai ini penulis akan menjelaskan mengenai identitas informan yang diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai identitas Informan pada table dibawah ini :

1. Jenis Kelamin Informan

Data informan menurut jenis kelamin ini perlu diturunkan sebagai bulan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi variabel penelitian, khususnya dalam mengetahui sejauh mana Strategi Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Pariwisata Daerah Kota Dumai Informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel ini :

Tabel V.2 : Jenis Kelamin Informan

No	Informan	Jenis Kelamin
1	Kepala Bidang Pariwisata	Perempuan
2	Kasi Sarana Pariwisata	Laki-Laki
3	Kasi Promosi Pengawasan Pariwisata	Perempuan
4	Kasi Pengawasan Objek Wisata	Perempuan
5	Pelaku Usaha Pariwisata	Perempuan
6	Masyarakat Pengunjung	Perempuan

Sumber : Modifikasi Penulis, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin informan dalam penelitian ini yaitu informan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1 orang , dan informan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 7 orang.

2. Tingkat Pendidikan Informan

Secara teoritis pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukan penelitian. Mengingat penelitian merupakan penelitian lapangan dengan melibatkan beberapa unsur, maka informan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan pada table berikut :

Tabel V.3 Pendidikan Informan

No	Informan	Pendidikan Terakhir
1	Kepala Bidang Pariwisata	S-1
2	Kasi Sarana Pariwisata	S-1
3	Kasi Promosi Pengawasan Pariwisata	S-1
4	Kasi Pengawasan Objek Wisata	S-1
5	Pelaku Usaha Pariwisata	SMA
6	Masyarakat Pengunjung	SMP-SMA

Sumber : Modifikasi Penulis, 2022

3. Usia Informan

Dalam menentukan informan, usia juga menjadi faktor penting untuk mempertimbangkan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat usia maka keputusan yang diambil

sehubungan dengan jawaban yang diinginkan akan semakin baik atau tepat dengan pemikiran yang matang.

Selanjutnya tingkat usia sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap aktifitas dalam hidupnya, dikarenakan tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang, dan juga mempengaruhi pola pikir dan standart kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan.

Tabel V.4 : Usia Informan

No	Usia	Jumlah
1	20-30	0
2	31-40	3
3	41-50	2
4	51-60	3

Sumber : Modifikasi Penulis, 2022

Adapun tingkatan umur dari seluruh informan yaitu, informan yang berumur diatas dua puluh tahun. Dari data diatas, diketahui informan tersebut sudah biasa memberikan jawaban dari permasalahan yang penulis teliti.

B. Strategi Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Pariwisata Daerah Kota Dumai

Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan analisis jawaban informasi yang berasal dari Kepala Bidang Pariwisata, Kepala Seksi Pengawasan objek pariwisata, Kepala Seksi Sarana Prasarana Pariwisata dan Kepala Seksi Promosi Pariwisata. Penulis melaksanakan wawancara dengan indikator sebagai berikut :

1. Pangsa Pasar
2. Tourist Attraction
3. Infrastruktur
4. Aksesibilitas
5. Fasilitas dan Pelayanan

Dalam penelitian ini dilakukan pembahasan satu persatu dari setiap penilaian yang telah diberikan informan terhadap pertimbangan yang telah disajikan agar data yang dihasilkan dapat mudah dipahami.

1. Pangsa Pasar

Pangsa pasar atau market share merupakan suatu cara memasarkan atau seberapa besar perusahaan mendominasi pasar, dapat dilihat dari ukuran perusahaan dengan ukuran pasar dan dapat diukur dari jumlah pelanggan, produksi, volume penjualan. Pangsa pasar memiliki tujuan untuk mengukur pemasaran perusahaan, jika persentase meningkat maka pemasaran produknya dapat dikatakan berhasil dari pada pesaing.

Pangsa pasar berarti suatu bentuk pemasaran yang dilakukan oleh dinas pariwisata Kota Dumai seperti dalam bentuk kegiatan promosi kepada pengunjung objek wisata, dan juga seperti ada yang dijual dari objek wisata daerah tersebut bisa disebut ciri khas.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 31 Januari 2022, Menurut Ibu Hepy Suryani Kepala Bidang Pariwisata bentuk promosi yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Kota Dumai untuk Organisasi Kepemudaan yaitu :

“Untuk strategi promosi sebelum covid kami melakukan kegiatan expo wisata keberbagai daerah yang ada di riau seperti batam, dumai, bengkalis dan untuk pemasaran disaat pandemi covid ini kami melakukan kegiatan promosi itu melalui media cetak, media sosial mengenai objek wisata yang ada di Kota Dumai”

Dapat disimpulkan oleh penulis dari wawancara diatas bahwa strategi promosi yaitu melakukan expo wisata keberbagai daerah namun ditahun 2018 hingga 2021 hal ini tidak terlaksana dikarenakan covid 19, sebagai gantinya pihak dinas pariwisata melakukan promosi hanya di media cetak dan media sosial. Sedangkan hasil wawancara dengan Kasi Promosi Pengawasan Pariwisata ibu Ja Satri Oktiva, A. Mk pada tanggal 31 Januari 2022 yaitu :

“Kegiatan promosi yang kami lakukan yaitu dengan cara pembuatan video profil pariwisata, pembuatan buku saku atau peta wisata yang akan dibagikan kepada masyarakat, hotel-hotel, rumah makan dan lain sebagainya, lalu yang menjadi ciri khas dari objek pariwisata kota dumai seperti pemandangan laut yang dapat dinikmati dan ada pemandangan batu batuan besar disekitar laut atau pantai namun yang difokuskan untuk saat ini pada program pengembangan pariwisata yaitu Taman Bukit Gelanggang dan Kampung Wisata Kuliner”

Dapat disimpulkan oleh penulis dari wawancara diatas yaitu pihak dinas pariwisata melakukan upaya promosi dengan pembuatan profil pariwisata yang dibagikan ke media sosial, membuat buku saku destinasi wisata dengan memamerkan potensi wisata yang ada.

Hasil wawancara dengan staff Promosi Pengawasan Pariwisata ibu Rostina , A.Md pada tanggal 31 Januari 2022 :

“Untuk penganggaran promosi pariwisata pantai itu sebenarnya berjumlah Rp 90.000.000 kurang lebih namun ada sedikit kendala karena menghadapi kasus covid yang dimana anggaran dialihkan untuk kesehatan dan ini sudah ada persetujuan dari Dinas pariwisata dan juga pihak pengelola”

Hasil wawancara dengan pelaku usaha pantai puak ibu yanti ,pada tanggal

1 Februari 2022 :

“Saya tertarik dengan objek wisata pantai puak ini dikarenakan ya melihat pemandangan laut, ditambah ada batu batuan dan bisa melihat matahari terbenam di sore hari”

Dapat disimpulkan oleh penuli dari hasil wawancara dengan masyarakat, banyak masyarakat yang mengagumi objek wisata pantai karena potensi alam yang sangat indah namun kurang dikembangkan saja oleh pihak dinas pariwisata.

Hasil wawancara dengan pengunjung pantai I , II pada tanggal 1 Februari 2022 :

“Yang saya suka dari pantai ini ada pasir untuk bersantai dan juga dengan pemandangan laut denga sepoi sepoi angin, dan ini dapat membuat relaks bagi kami yang selalu mengurus anak anak dirumah”

Dari observasi yang dilakukan penulis dilapangan dinas pariwisata yaitu promos'i fokus ke Taman Bukit Gelanggang dan Wisata Kuliner namun tidak dengan objek wisata pantai, karna terdapat kendala dalam penganggaran khusus pengembangan objek wisata daerah seperti pengalihan penganggaran untuk kesehatan di masa pandemi covid-19.

2. Tourist Attraction (Daya Tarik)

Tourist Attraction wisata merupakan tempat yang menarik yang dimana wisatawan berkunjung biasanya karena ada nilai asli atau nilai alam yang dipamerkan, keindahan alami atau buatan, yang menawarkan waktu luang dan hiburan. Dan juga untuk mengunjungi tempat wisata selain nilai-nilai diatas yang menjadi pertimbangan lain yaitu seperti infrastruktur dan prasarana yang dimiliki oleh tempat wisata tersebut (Yoetr 1996).

Hasil wawancara pada tanggal 31 Januari 2022 dengan Staff Promosi

Pengawasan Pariwisata ibu Rostina, A.Md :

“Mengenai nilai sejarah kami dari Dinas Pariwisata Kota Dumai sudah melakukan penjelasan atau asal usul yang kami buat di buku saku Destinasi Wisata Kota Dumai khusus pengunjung yang sudah kami sebar, namun kalau secara langsung yang menceritakan sejarah itu pengelola objek wisata daerah itu sendiri”

Dapat disimpulkan oleh penulis terkait wawancara diatas dengan staff promosi pariwisata untuk nilai alam mereka hanya menjelaskan dibuku saku destinasi wisata yang dibuat oleh pihak dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata Kota Dumai. Hasil wawancara dengan Kabid Pariwisata ibu Dra. Heppi Suryani pada tanggal 31 Januari 2022 :

“Untuk keaslian objek wisata daerah kota dumai tentu dipertahankan seperti Bandar Bakau, Pantai Puak, Pantai Koneng dan sebagainya, namun tugas kita dari dinas pariwisata masih banyak perbaikan, apalagi dizaman pandemi ini anggaran banyak dialihkan untuk kesehatan, lalu untuk skala event di setiap objek wisata belum ada dilaksanakan dari dinas pariwisata karena kita menimbang keadaan dimasa pandemi yang tentunya tidak mendukung untuk keramaian maka untuk event belum terlaksana”

Dapat disimpulkan penulis dari hasil wawancara diatas untuk keaslian alam objek wisata yang dipertahankan yaitu seperti bandar bakau, pantai pantai yang ada di daerah kota dumai. Hasil wawancara dengan Kasi Sarana Pariwisata bapak Mahdar Rinaldi, S.Sos pada tanggal 31 Januari 2022 :

“Untuk panorama alam saat ini di Kota Dumai kita mempunyai banyak destinasi wisata khusus nya pantai yang harus ada perbaikan dan perlu adanya pengembangan lagi, jadi semua masih didalam proses, untuk saat ini yang menjadi fokus yaitu Taman Bukit Gelanggang dan Wisata Kuliner, untuk pantai akan menyusul”

Hasil wawancara dengan pelaku usaha destinasi wisata ibu yanti pada tanggal 1 Februari 2022 :

“Panorama alam di pantai puak inilah seperti yang kita lihat, kita bisa menikmati pemandangan laut dan bebatuan besar, hanya saja yang perlu dijaga adalah kebersihan dan fasilitas agar pengunjung pun nyaman untuk datang dan kami sebagai yang berjualan disini pun terbantu”

Hasil wawancara dengan pengunjung objek wisata daerah pantai I, II, III pada tanggal 1 februari 2022 :

“Yang membuat menarik yaitu bisa melihat pemandangan laut dan membuat rileks, namun untuk event seperti ini belum ada, ditambah disaat kami datang terkadang tidak ada aktifitas disini mungkin karna covid ini orang-orang takut”

Berdasarkan observasi penulis dilapangan Dinas Pariwisata sudah menceritakan nilai sejarah dan sudah ada tertera di Buku Saku Destinasi Wisata Daerah Kota Dumai yang mana dibagikan kepada masyarakat, rumah makan, hotel-hotel. Namun untuk skala event belum ada dilaksanakan semenjak masa pandemi melanda, dikarenakan keadaan yang tidak mendukung dan juga anggaran banyak dialihkan untuk kesehatan.

3. Infrastruktur

Didalam buku Tourism Planning, menurut Inskeep 1991. Infrastruktur dalam konteks perencanaan merupakan penyediaan kebutuhan dasar sebagai penunjang pembangunan perkotaan industri dan juga pariwisata dan mengacu pada segala bentuk konstruksi dibawah tanah ataupun diatas tanah.

Infrastruktur juga dibuat untuk mendukung segala aktivitas manusia, infrastruktur juga sengaja dibangun untuk bisa mempermudah dan membantu kegiatan ditempat wisata, tidak hanya melihat dari segi estetika namun juga nilai sejarah menjadi tolak ukur dari pengunjung wisata.

Infrastruktur juga terdiri dari sarana dan juga prasarana, adapun untuk sarana objek pariwisata adalah merupakan daerah kelengkapan tujuan wisata yang dibutuhkan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Sedangkan prasarana objek wisata adalah merupakan sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya ke daerah tujuan wisata.

Hasil wawancara dengan Kasi Sarana Pariwisata Bapak Mahdar Rinaldi S.Sos pada tanggal 31 Januari 2022 :

“Sarana dan prasarana penunjang yang ada di Pantai Puak yang ada saat ini seperti fasilitas sarana dan prasarana gazebo, tempat bermain anak, penambahan papinblok, panggung, mushola, wc, dan kantor pusat informasi”

Hasil wawancara pada tanggal 31 Januari 2022 dengan Staff Promosi Pengawasan Pariwisata ibu Rostina, A.Md :

“Masih kurang untuk sarana yang tentunya harus ada perbaikan dan pengembangan, karena masih banyak sarana prasarana yang rusak dan tidak layak untuk dipakai, dan juga masih banyak sampah yang berserakan di sekitar objek wisata pantai tersebut, untuk pantai masih perlu banyak nya pengembangan apalagi ada pantai yang tidak beroperasi seperti pantai pulau bungkuk ditambah lagi karna masa pandemi semua aktivitas terdapat penurunan”

Dari hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk sarana dan prasarana di pantai teluk makmur puak sudah lengkap namun kurang dikembangkan dan perbaikan fasilitas dan juga pemeliharaan yang kurang. Hasil wawancara dengan pelaku usaha objek wisata pantai puak ibu yanti pada tanggal 1 februari 2022 :

“Masih banyak yang harus diperbaiki menurut saya, karena bisa dilihat sekarang, banyak yang rusak, wc pun rusak dan banyak tidak terawat,

namun dari pihak pengelola katanya lagi proses, namun sepertinya belum selesai”

Berdasarkan observasi penulis dilapangan Dinas Pariwisata sudah memberikan sarana dan prasarana penunjang namun yang kurang yaitu seperti perawatan dan juga kebersihan, lalu banyak dari sarana prasarana yang rusak juga, banyak dari objek wisata yang tidak beroperasi lagi karena kurangnya anggaran akibat masa pandemi.

4. Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan fasilitas yang disediakan untuk semua orang yang bertujuan mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Aksesibilitas tentu dapat dikatakan penting karena sebagai perangsang tumbuhnya pasar dan pusat pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 mengatakan bahwa Aksesibilitas Pariwisata adalah semua dari sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata.

Aksesibilitas juga termasuk menjadi kemudahan akses yang diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya. Aktivitas kepariwisataan tergantung pada transportasi dan komunikasi, karena yang dapat mempengaruhi keinginan seseorang untuk perjalanan wisata adalah faktor jarak dan waktu. Selain dari transportasi yang termasuk dalam aksesibilitas adalah prasarana seperti petunjuk arah, papan informasi.

Hasil wawancara dengan Kasi Sarana Pariwisata Bapak Mahdar Rinaldi

Sos pada tanggal 31 Januari 2022 :

“Objek wisata kita mempunyai keunggulan yaitu mudah dijangkau, dan dari Dinas Pariwisata membuat web untuk mempermudah akses menuju ke

lokasi objek wisata daerah, langsung scan barcode saja maka penjelasan akan keluar terkait objek wisata daerah”

Hasil wawancara dengan hasil wawancara dengan Kasi Promosi

Pengawasan Pariwisata ibu Ja Satri Oktiva, A. Mk pada tanggal 31 Januari 2022

yaitu :

“Dari dinas pariwisata belum ada menyediakan Transportasi pribadi, untuk wisatawan luar atau dalam negeri memang biasanya memakai bus pariwisata yang umumnya berasal dari agen atau layanan yang terkait pada bidang pariwisata. Tapi banyak pengunjung luar yang berdatangan dengan kendaraan pribadi, ditambah lagi ada akses jalan tol yang semakin mempermudah dan mendukung untuk kegiatan wisatawan, pendatang dari luar kebanyakan dari daerah Duri, Pekanbaru, Perawang, Ujung Batu, Bagansiapi.”

Hasil wawancara dengan pelaku usaha objek wisata pantai puak ibu yanti pada tanggal 1 februari 2022 :

“Untuk pendatang biasanya kebanyakan menggunakan mobil pribadi dengan keluarga mereka, banyak juga pengunjung memakai motor”

Berdasarkan observasi penulis dilapangan Dinas Pariwisata belum menyediakan transportasi pribadi, melainkan melalui agen yang tersedia dalam bidang pariwisata. Aksesibilitas juga dipermudah dengan adanya pembuatan web menuju lokasi melalui scan barcode saja maka dapat mempermudah akses.

5. Fasilitas dan Pelayanan Wisatawan

Fasilitas wisata merupakan pelengkap daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dari wisatawan yang sedang menikmati perjalanan wisata. Fasilitas wisatan dibuat untuk mendukung konsep atraksi wisata yang sudah ada.

Fasilitas yang mempengaruhi pengunjung wisata, wisatawan akan berkunjung kembali jika fasilitas-fasilitas objek wisata daerah tersebut lengkap,

karena merasa nyaman dan tinggal lebih lama serta memberi kesan baik terhadap wisata yang dikunjungi. Untuk mendukung adanya fasilitas tentunya harus ada pelayanan yang baik pula serta dapat memberi kemudahan didalam pelayanan.

Hasil wawancara dengan Kasi Sarana Pariwisata Bapak Mahdar Rinaldi

S.Sos pada tanggal 31 Januari 2022 :

“untuk makanan dan minuman sudah ada yang berjualan disekitar objek wisata daerah, untuk tempat dikelola oleh pengelola objek wisata daerah, yang berjualan pun disana atas kesepakatan masyarakat setempat, namun dari Dinas Pariwisata kami akan pantau bagaimana perkembangan dilokasi”

Hasil wawancara pada tanggal 31 Januari 2022 dengan Staff Promosi

Pengawasan Pariwisata ibu Rostina, A.Md :

“Untuk pelayanan informasi dari Dinas pariwisata sudah membuat website khusus dan ada barcode untuk bisa membuka bagian bagian informasi wisata, ini upaya yang bisa dilakukan saat ini dimana keadaan yang banyak kurang mendukung akibat masa pandemi ini, namun untuk kelengkapan fasilitas belum bisa dibilang seratus persen lengkap karena masih banyak yang harus ada perbaikan, ditambah kurang nya kesadaran masyarakat setempat akan peduli destinasi wisata”

Hasil wawancara dengan pelaku usaha destinasi wisata ibu yanti pada

tanggal 1 Februari 2022 :

“Ketersediaan makanan dan minuman sekarang dikatakan kurang lengkap karna banyak yang istirahat, pengunjung sepi dan ada perbaikan ruko, hanya satu atau dua yang berjualan disekitar pantai, pengunjung juga biasanya banyak yang membawa makanan dan minuman sendiri seperti membawa bekal”

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan untuk ketersediaan makanan dan minuman belum dikatakan lengkap karena masih ada perbaikan ruko tempat berjualan jadi hanya beberapa pengusaha yang berjualan, untu penanganan informasi sudah disediakan pihak dinas pariwisata melalui website yang sudah dibuat khusus informasi wisata.

C. Faktor Penghambat Strategi dalam Pengembangan Objek Pariwisata Daerah Kota Dumai

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di peroleh informasi tentang Peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam Pengembangan Objek Pariwisata di Kota Dumai, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor- faktor penghambat Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Dalam Strategi Pengembangan Objek Pariwisata Daerah Kota Dumai yaitu :

Adapun yang penulis dapatkan faktor-faktor penghambat yang ditemukan dalam Strategi Dinas Pariwisata dalam mengembangkan pariwisata daerah Kota Dumai adalah :

1. Kurangnya sumber daya yang dimiliki Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam memahami akan permasalahan pengembangan pariwisata daerah Kota Dumai.
2. Minimnya anggaran dalam proses pengembangan objek wisata daerah pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, sehingga strategi pengembangan objek wisata daerah terhambat.
3. Kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat, sehingga menghambat pengembangan objek wisata daerah Kota Dumai.
4. Dinas terkait kurang memperhatikan strategi pengembangan objek wisata pantai di Kota Dumai.
5. Kurangnya kesadaran investor sehingga memperlambat pengembangan objek wisata daerah Kota Dumai.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang strategi dinas pariwisata Kota Dumai terhadap pengembangan objek wisata daerah Kota Dumai, maka penulis menarik kesimpulan bahwa strategi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dalam mengembangkan objek wisata daerah masih kurang optimal pelaksanaannya.

1. Pangsa Pasar

Dalam indikator pangsa pasar terkait strategi pengembangan objek wisata daerah yaitu strategi promosi yang dilakukan saat ini adalah dengan cara pemasaran melalui membagikan profil pariwisata dalam bentuk video, juga buku saku atau peta wisata yang dibagikan kepada masyarakat dan hotel-hotel, rumah makan, namun untuk kegiatan expo tidak dilakukan karena adanya hambatan terutama pada masa covid-19. Pemerintah dilihat kurang perhatian terhadap pengembangan objek wisata daerah pantai, penanganan dilihat lambat karena pengembangan pariwisata kurang diperhatikan.

2. Tourist Attraction (Daya Tarik)

Dalam indikator tourist attraction (daya tarik) terkait strategi pengembangan objek wisata daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai terlihat kurang bekerjasama dengan masyarakat dari segi pengembangan objek wisata daerah agar masyarakat ikut serta dalam pengembangan objek wisata daerah.

3. Infrastruktur

Dalam indikator infrastruktur terkait strategi pengembangan objek wisata daerah yaitu bahwa Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dilihat kurang memperhatikan atau melestarikan infrastruktur yang sudah ada karena sarana dan prasarana penunjang masih banyak yang rusak dan tidak terjaga dengan baik, dan juga Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai kurang memberikan pengarahannya terhadap masyarakat terhadap sadar akan lingkungan wisata.

4. Aksesibilitas

Dalam indikator aksesibilitas terkait strategi pengembangan objek wisata daerah yaitu untuk aksesibilitas Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai sudah mempermudah dengan adanya website ataupun buku saku yang dapat mempermudah masyarakat, namun pada nyatanya masih banyak masyarakat yang belum tau, jadi masih kurangnya pemanfaatan informasi dan teknologi oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dan untuk penyediaan bus ataupun alat transportasi belum ada.

5. Fasilitas dan Pelayanan Wisatawan

Dalam indikator fasilitas dan pelayanan wisatawan terkait strategi pengembangan objek wisata daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai belum berjalan maksimal karena kurang perhatian dan kurang koordinasi dengan masyarakat terhadap dilingkungan objek wisata daerah, untuk kelengkapan makanan dan minuman itu belum dapat dikatakan lengkap karena terhambat oleh tempat penyediaan yang belum juga selesai.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan peneliti terkait strategi pengembangan objek wisata daerah Kota Dumai adalah :

1. Menurut penulis Pemerintah Daerah atau Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata seharusnya lebih memperhatikan dan lebih serius lagi dalam pengembangan objek wisata daerah Kota Dumai.
2. Menurut penulis Pemerintah Daerah atau Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata disarankan agar dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta agar dapat membantu dalam pengembangan objek wisata daerah Kota Dumai.
3. Menurut penulis Pemerintah Daerah atau Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata seharusnya lebih meningkatkan kualitas informasi dan kualitas promosi seperti membuat event-event terbaru agar dapat menambah daya tarik masyarakat atau pengunjung.
4. Menurut penulis Pemerintah Daerah dan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata seharusnya agar lebih memperhatikan lingkungan objek wisata daerah dan meningkatkan sarana dan prasarana dan harus ada penjagaan lebih baik pada sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku

- Atmosudirjo, Prajudi dalam Hasan. (2004). *Pokok-pokok Materi Teori Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Bakaruddin. 2008. *Perkembangan dan Permasalahan Kepariwisataaan*. Padang: UNP Press.
- Canaldhy, Rendy Sueztra. (2016). “Kinerja Organisasi Pelayanan Publik di Pemerintahan.” *Jurnal Pemerintahan dan Politik* (Nomor 1 volume 3). Universitas Gajah Mada.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- David, Fred, R. 2011. *Strategic Management Manajemen Strategi Konsep, Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Freddy, Rangkuti. 2006. *Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan*. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hadari, Nawawi. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*, Cetakan Ke-4, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hanitasari, Riris. (2014). “Kualitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dalam Program Bantuan Kesehatan Masyarakat Miskin di RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo.” Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- Inskeep Edward, 1998, *Guide for local Authorities on Developing Sustainable Tourism*. World Tourism Organization, New York.
- Ismayanti. 2009. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: Grasindo
- Josef Riwu Kaho. (1997). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Mahmudin. 2010 *Manajemen Kinerja Sektor Publik Jakarta*. STIE YKPN.
- Maisardi, 2005. *Eksistensi Kawasan Pantai Air Manis Sebagai Objek Wisata Kota Padang*, (Skripsi) FIS UNP. Padang.
- Munaf, Yusri 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru
- Musanef, 2002, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta : PT Gunung Agung.
- Musanef. (1992). *Manajemen Kepegawaian Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.

- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta, Rineke Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Rineka Cipta
- Ramly, Nadjamuddin. 2007. *Pariwisata Berwawasan Lingkungan*. Jakarta:Grafindo
- Rangkuti, Freddy. 2013. *Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rasyid, M.Ryaas, 2001. *Makna Pemerintahan : Tinjauan dari segi etika dan Kepemimpinan*, Jakarta, PT. Mutiara Sumber Widya.
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 2007. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi AksaraPress.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syafiie, Kencana, Inu, 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Bandung, Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tjiptono, Fandy. 2006. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Stoner, S., James A.F., Edward Freeman and Gilbert, Daniel. 2005. *Management*. New Jersey: Prentice Hall inc.

b. Regulasi

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
- Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 4, tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pasal 12, Ayat 1.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025

c. Publikasi

Adam Muakhor (2008) “Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Randusan Indah Kabupaten Brebes Sebagai Objek Wisata Unggulan”

Andri Oktosilva (2018) “Strategi Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata di Tana Toraja”

G.Liase (2016) “Strategi Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengembangan Pariwisata Lombok Ranau untuk Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat

Zuzi Maima Zura (2018) “Pengelolaan Objek Wisata di Kecamatan Kuok oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar”

Vina Wahyuni (2016) “Strategi Pengembangan Objek Pariwisata Pantai Air Manis di Kelurahan Air Manis Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.